

PROFIL *Gender* KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020



"**Gender** merupakan Seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat."

PROFIL GENDER

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2020

Ukuran Buku

21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman

xi + 54 halaman

NASKAH

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

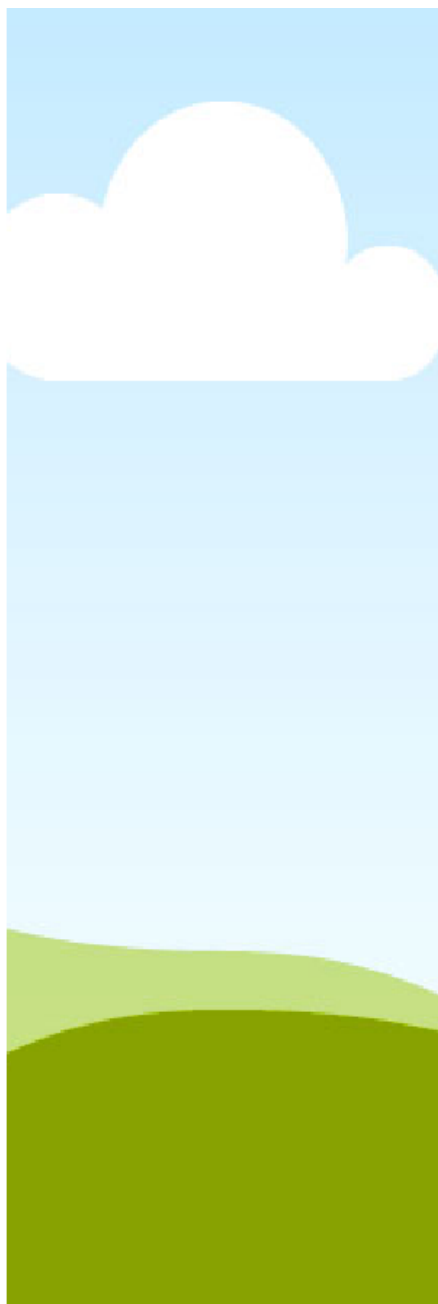
GAMBAR KULIT

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

DITERBITKAN OLEH

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan
sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen.





TIM PENYUSUN

BUKU PROFIL GENDER

KABUPATEN SRAGEN

PENANGGUNGJAWAB

dr. JOKO PURYANTO, M.Kes

KETUA PELAKSANA

SITI SUHARMI, SH.M.Si

SEKRETARIS

A.ENDHANG WIDAYATI, ST

ANGGOTA

TIWI HANIMPUNI, SH

IR. NANIK SUKAPTI

AGUSTINA TRIBUDI RAHAYU, SH

DYAH NURSARI

BUDIYAH, S.Sos





KATA SAMBUTAN

BUPATI SRAGEN

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Sragen sudah dicanangkan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan, telah banyak program program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai implementasi PUG. Buku Profil Gender Kabupaten Sragen Tahun 2020 ini diharapkan mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh pihak untuk guyub rukun bekerja sama dan bekerja lebih keras lagi dalam pengarusutmaan gender di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, sehingga cita-cita kita untuk mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai Kabupaten yang setara dan adil gender bisa segera terwujud nyata.

Demikian sambutan dari saya, semoga buku profil gender tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sragen , 31 Desember 2019
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KATA PENGANTAR



PLT KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SRAGEN

Kebijakan Pengarusutamaan gender adalah strategi pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dan program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan adil gender.

Buku Profil Gender Kabupaten Sragen Tahun 2020 ini berupaya untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan PUG di wilayah Kabupaten Sragen. Diharapkan buku ini bisa menjadi media informasi serta menambah motivasi dari semua pihak untuk bekerja lebih giat lagi dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Sragen

Dalam penyusunan Buku Profil Gender Kabupaten Sragen tahun 2020 ini kami bekerja sama dengan semua pihak yang ikut memberikan bantuan berupa saran, pertimbangan, data dan informasi sehingga dapat kami rangkum menjadi sebuah buku. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bupati Sragen;
2. Wakil Bupati Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepolisian Resort Sragen;
5. Kantor Kementerian Agama Sragen;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen;
7. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;

11. Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen;
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen
18. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
19. RSUD dr. Soehardi Priyonegoro Sragen;
20. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
21. Camat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen;
22. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen;
23. Pusat Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak Kabupaten Sragen;
24. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen
25. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Kabupaten Sragen
26. Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM UNS
27. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kerjasama, sumbang saran dan tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhirnya kami selaku penyusun memohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Buku Profil Kabupaten Layak Anak Tahun 2019. Kritik dan masukan tetap kami harapkan demi kesempurnaan Buku Profil Kabupaten Layak Anak di tahun-tahun mendatang.

Sragen, 31 Desember 2019,

Plt.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen,

JOKO PURYANTO



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penyajian	4
2. STRUKTUR PENDUDUK	5
3. KONDISI PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN SRAGEN	10
3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen.....	11
3.1.1. Umur Harapan Hidup (UHH).....	13
3.1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	13
3.1.3. Pengeluaran Perkapita	14
3.1.4. IPM Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah.....	15
3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sragen	17
3.2.1 Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-Laki	19
3.2.2. Laki-laki dan Perempuan Memiliki Peluang Sama untuk Mengetahui Pendidikan	21
3.2.2. Realita Capaian Pendidikan Antargender Masih timpang...	22
3.2.3. Ekonomi Sragen Secara Umum Masih Didominasi Laki-laki.	23
3.3. Pembangunan Gender Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah.....	25
4. PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN SRAGEN.....	27
4.1 Kiprah Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan	29
4.2 Harapan akan Kesetaraan pada Pekerjaan Profesional.....	32
4.3. Kontribusi Perempuan dalam Penciptaan Pendapatan Semakin Diperhitungkan.....	39
5. PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL	41

5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Kelamin	41
5.1.1 Fakir Miskin.....	41
5.1.2 Pemulung.....	42
5.1.3 Lansia Terlantar	43
5.1.4 Warga Bekas Binaan Lembaga Perasyarakatan (LP).....	44
5.1.5 Wanita Tuna Susila.....	44
5.1.6 Eks Korban NAPZA.....	45
5.1.7 Penyandang Disabilitas.....	45
5.2. Status Kepemilikan Rumah dan Perumahan Kumuh.....	46
6.HUBUNGAN ANTARA PEMBANGUNAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN GENDER.....	50
6.1 Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender Berjalan Searah	50
6.2.Peningkatan Kualitas Perempuan Seharusnya Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen , 2019.....	6
Tabel 2.2	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin, 2019	7
Tabel 2.3	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2019.....	7
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2019.....	8
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2019.....	8
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2019.....	9
Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Menurut Komponen Tahun 2010-2019.....	12
Tabel 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten /Kota Jawa Tengah, 2018-2019.....	16
Tabel 3.3	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2019.....	20
Tabel 3.4	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah.....	25
Tabel 4.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen, 2019.....	30
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Negeri Dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 2018.....	33
Tabel 4.3	Persentaase Pejabat di lembaga Yudikatif Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tbael 5.1	Persentaase Peyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitas di kabupaten Sragen tahun 2019.....	46
Tabel 5.2	Sebaran, Luas dan Tingkat Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sragen Tahun 2019.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Tahun 2010-2019.....	12
Gambar 3.2	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Sragen , 2010-2019.....	13
Gambar 3.3.	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sragen, 2010-2019.....	14
Gambar 3.4	Pengeluaran per Kapita Per Tahun Kabupaten Sragen, 2010–2019 (juta rupiah)	15
Gambar 3.5	IPM Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018	17
Gambar 3.6	IPG dan IPM Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018.....	18
Gambar 3.7	IPG Kabupaten Sragen Tahun 2010-2018.....	18
Gambar 3.8	Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018.....	20
Gambar 3.9	Harapan Lama Sekolah di kabupaten Sragen, Tahun 2017-2018.	21
Gambar 3.10	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sragen, Tahun 2017-2018.....	22
Gambar 3.11	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin (dalam ribuan) Di kabupaten Sragen Tahun 2017-2018.....	24
Gambar 4.1	IDG Kabupaten Sragen tahun 2010-2018.....	28
Gambar 4.2	Perkembangan Komponen IDG Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018.....	29
Gambar 4.3	Persentase Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019.....	31
Gambar 4.4	Perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi dan Teknisi di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018.....	33
Gambar 4.5	Jumlah Pejabat Eselon II-IV di kabupaten Sragen, Tahun 2019.....	35
Gambar 4.6	Persentase PNS di Kabupaten Sragen berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan.....	37
Gambar 4.7	Persentase Camat dan Kepala Desa Berdasarkan Jenis kelamin	37
Gambar 4.8	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Di Kabupaten Sragen Tahun 2017 dan 2018.....	39

Gambar 5.1	Persentase Fakir Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019.....	42
Gambar 5.2	Persentase Pemulung Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019.....	43
Gambar 5.3	Persentase Lansia Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019.....	43
Gambar 5.4	Persentase Warga Bekas Binaan Lembaga pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019.....	44
Gambar 5.5	Kegiatan Seminar Implementasi E-Gov Dan Sosialisasi Internet Sehat Dengan Melibatkan Anak.....	45
Gambar 5.6	Persentase Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019.....	47
Gambar 5.7.	Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Sragen tahun 2019.....	48
Gambar 5.8	Jumlah Anak yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Jenis PAUD dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	49

PENDAHULUAN

PROFIL GENDER

LATAR BELAKANG

Data Pilah Sebagai Prasyarat
Pengarusutmaan Gender

DATA PILAH



IPG DAN IDG



TUJUAN

Mengetahui Kondisi
Pembangunan dan
Pemberdayaan Berbasis
Gender

METODE

STUDI DOKUMENTASI
DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION



SUMBER DATA



**SKPD DAN
DOKUMENTASI**

1.1.Latar Belakang

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai “warga kelas dua”.

Kesepakatan secara internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (BDPA). Kini, isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, juga menjadi poin dalam tiga isu strategis RPJMN 2015-2019, yakni: Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ; Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) , dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut kesetaraan gender diperlukan adanya Data Terpilah Statistik Gender. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

menyusun Profil Gender Tahun 2020. Tersusunnya profil tersebut juga sebagai pemenuhan 7 prasyarat PUG dalam pembangunan

1.2.Tujuan

Penerbitan publikasi ini bertujuan mendeskripsikan dan menginformasikan kepada pemerintah dan berbagai institusi swasta dan masyarakat tentang kondisi pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Sragen sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan gender yang telah dan sedang berlangsung. Kondisi gender di Kabupaten Sragen yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa dimensi yaitu pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Sragen.

Metode-metode baru dalam pengumpulan dan penggunaan data terkait anak akan membantu investasi sekaligus intervensi program-program pembangunan terkait gender lebih tepat sasaran.

1.3.Sumber Data

Analisis yang disajikan dalam publikasi ini umumnya bersumber dari data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga yang berkaitan dengan gender di Kabupaten Sragen diantaranya data dari:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
2. Kepolisian Resort Sragen
3. Kantor Kementerian Agama Sragen
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen
5. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;
9. Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen;
15. Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen
16. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
17. RSUD dr. Soehardi Priyonegoro Sragen;
18. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
19. Camat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen;

20. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen;
21. Pusat Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak Kabupaten Sragen;
22. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen
23. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Kabupaten Sragen
24. Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM UNS
25. Data juga diperoleh dari: Kabupaten Sragen dalam Angka 2020; Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen Tahun 2019; Profil Anak Indonesia tahun 2019; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019; Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

1.4.Sistematika Penyajian

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, dan sistematika publikasi. **Bab ke-dua** berisi Struktur Penduduk berdasarkan Gender. **Bab ketiga** berisi Pembangunan Manusia Berbasis Gender **Bab keempat** berisi Pemberdayaan Gender. **Bab ke-lima** Pembangunan Gender Bidang Sosial **Bab ke-enam** Hubungan antara Pembangunan Gender dan Pemberdayaan gender

STRUKTUR PENDUDUK

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2019



96
RASIO JENIS
KELAMIN



STATUS PERKAWINAN

TINGKAT
PERCERAIAN 10,94%

STRUKTUR PENDUDUK

02

Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Sragen tercatat sebanyak mencapai 890.518 jiwa. Dengan perbandingan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki (51% : 49%). Dengan rasio jenis kelamin adalah 96. Ini berarti terdapat 96 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Berdasarkan sebaran Kecamatan rasio tertinggi terdapat pada Kecamatan Kalijambe (101,55) sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Sumberlawang (Lihat tabel 2.1).

Tabel 2.1.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen , 2019

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)
Kalijambe	101,55
Plupuh	94,48
Masaran	98,20
Kedawung	97,26
Sambirejo	95,57
Gondang	95,42
Sambung Macan	94,59
Ngerampal	96,58
Karangmalang	97,09
Sragen	96,75
Sukoharjo	96,53
Tanon	93,93
Gemolong	95,88
Miri	96,59
Sumberlawang	93,19
Mondokan	95,77
Sukodono	91,21
Gesi	91,34
Tangen	96,19
Jenar	94,40
Kabupaten Sragen	96,00

Sumber: Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan kelompok umur (10 tahunan), komposisi penduduk paling banyak berada di usia 60+ dengan prosentase penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-

laki. Sedangkan komposisi penduduk yang paling sedikit adalah usia 30-39 tahun, dengan prosentase penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki (lihat tabel 2.2)

Tabel 2.2.

Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin, 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-9	15,28	13,81	14,53
10-19	15,24	14,00	14,61
20-29	13,59	13,09	13,33
30-39	13,16	13,31	13,24
40-49	13,70	14,33	14,02
50-59	13,54	14,13	13,84
60+	15,48	17,34	16,43
Kabupaten Sragen	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sragen 2019

Tabel 2.3.

Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2019

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	23,06	67,03	9,91	100
Perempuan	20,90	67,27	11,82	100
Kelompok pengeluaran				
40 Persen Terbawah	25,13	63,02	11,85	100
40 Persen Tengah	20,54	69,16	10,30	100
20 Persen Teratas	18,49	71,36	10,15	100
Kabupaten Sragen	21,96	67,15	10,89	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sragen 2019

Berdasarkan status perkawinan, penduduk berumur 10 tahun keatas dengan status bercerai lebih banyak terjadi pada penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah. Sedangkan dilihat dari jenis kelaminnya jumlah perempuan yang bercerai lebih banyak

daripada laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan, perceraian lebih banyak terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan SD kebawah (lihat tabel 2.4).

Tabel 2.4.

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2019

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	30,13	65,14	4,74	100
Perempuan	20,78	62,42	16,80	100
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	25,39	61,85	12,76	100
40 Persen Tengah	26,33	65,18	8,50	100
20 Persen Teratas	23,19	64,38	12,43	100
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	22,56	59,40	18,04	100
SMP ke atas	28,07	68,07	3,85	100
Kabupaten Sragen	21,96	63,74	10,94	100

Sumber: Statistik kesejahteraan Kabupaten Sragen 2019

Tabel 2.5.

Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2019

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	37,04	60,57	2,40	100
Perempuan	22,34	72,58	5,09	100
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	29,34	67,07	3,61	100
40 Persen Tengah	31,14	65,87	2,99	100
20 Persen Teratas	26,97	67,53	5,50	100
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	18,41	75,09	6,50	100
SMP ke atas	33,24	63,90	2,86	100
Kabupaten Sragen	21,96	66,67	3,76	100

Sumber: Statistik kesejahteraan Kabupaten Sragen 2019

Hampir serupajuga terjadi pada penduduk berusia 15-49 tahun, perbedaannya hanya pada penduduk dengan jumlah pengeluaran 20 persen teratas yang lebih banyak bercerai (lihat tabel 2.5).

Tabel 2.6.

Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2019

Karakteristik	Kelompok Umur	
	5 tahun ke atas	17 tahun ke atas
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	99,33	60,57
Perempuan	22,34	72,58
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	29,34	67,07
40 Persen Tengah	31,14	65,87
20 Persen Teratas	26,97	67,53
Pendidikan Tertinggi		
SD ke bawah	18,41	75,09
SMP ke atas	33,24	63,90
Kabupaten Sragen	21,96	66,67

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sragen Tahun 2019

Terkait data kependudukan, persentase terbanyak yang tercatat memiliki NIK adalah laki-laki usia 5 tahun ke atas, hal itu berbanding terbalik pada usia 17 tahun ke atas, justru perempuan yang tercatat lebih banyak memiliki NIK. Yang belum memiliki NIK dilihat dari tingkat pendidikan adalah mereka yang tingkat pendidikannya SD ke bawah dan penduduk yang pengeluarannya tergolong 20 persen ke atas.

KONDISI PEMBANGUNAN GENDER

KABUPATEN SRAGEN

IPM



IPG



KONDISI PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN SRAGEN

03

3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen

Pembangunan manusia meliputi konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerjasama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan (Amartya Sen, 1989). Untuk menyederhanakan konsep yang sangat luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah umur harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta pengeluaran konsumsi (mewakili dimensi ekonomi).

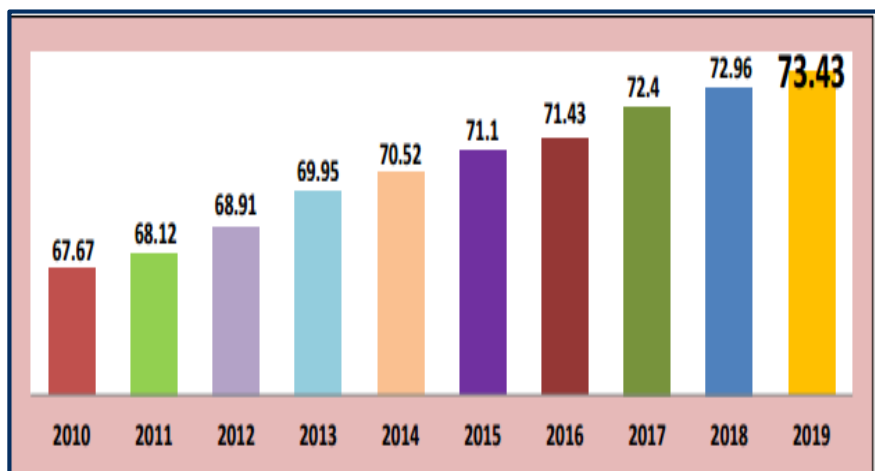
Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.

Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2010 sebesar 67,67 terus meningkat menjadi 73,43 pada tahun 2019 (lihat Gambar 3.1). Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Sragen naik sebesar 5,76 poin dan rata-rata tumbuh sebesar 0,95 persen per tahun. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Sragen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Kabupaten Sragen pada posisi ketiga belas dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Tahun 2010-2019



Sumber : Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Sragen tahun 2019

Tabel 3.1

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Menurut Komponen Tahun 2010-2019

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.05	75.13	75.2	75.27	75.31	75.41	75.43	75.55	75.60	75.62
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11.16	11.21	11.68	11.92	12.19	12.21	12.30	12.64	12.65	12.69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.24	6.26	6.28	6.69	6.85	6.86	6.87	7.04	7.22	7.34
Pengeluaran per kapita	Rp 000	10,16	10,51	10,70	10,86	10,88	11,43	11,69	12,04	12,39	12,72
IPM		67.67	68.12	68.91	69.95	70.52	71.10	71.43	72.40	72.96	73.43
Selisih			0.45	0.79	1.04	0.57	0.58	0.33	0.97	0.56	0.47
Pertumbuhan IPM	%		0.66	0.92	1.12	1.05	1.01	0.93	1.00	0.98	0.95

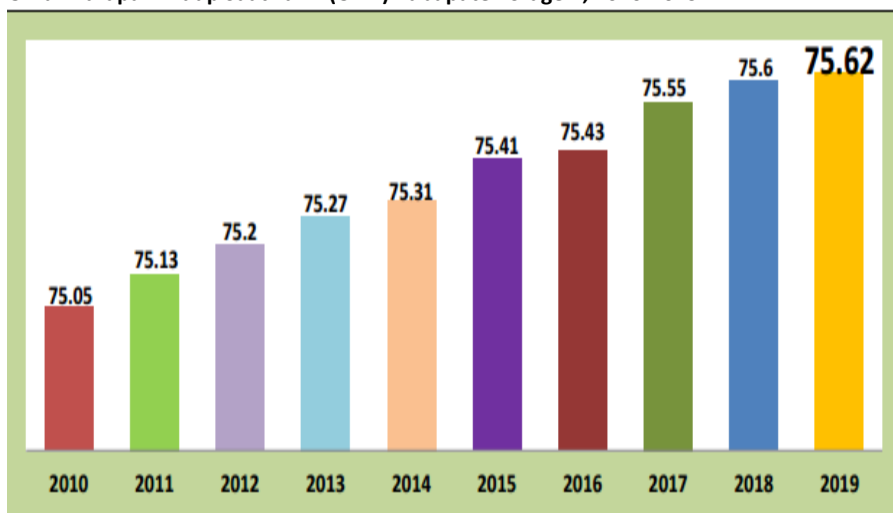
Sumber : Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Sragen tahun 2019

3.1.1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan UHH Kabupaten Sragen selama periode 2010-2019 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Selama periode tersebut secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh 0,08 persen per tahun. Tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Sragen sebesar 75,05 tahun, meningkat 0,57 menjadi 75,62 tahun di tahun 2019.

Gambar 3.2.

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Sragen , 2010-2019



Sumber : Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Sragen tahun 2019

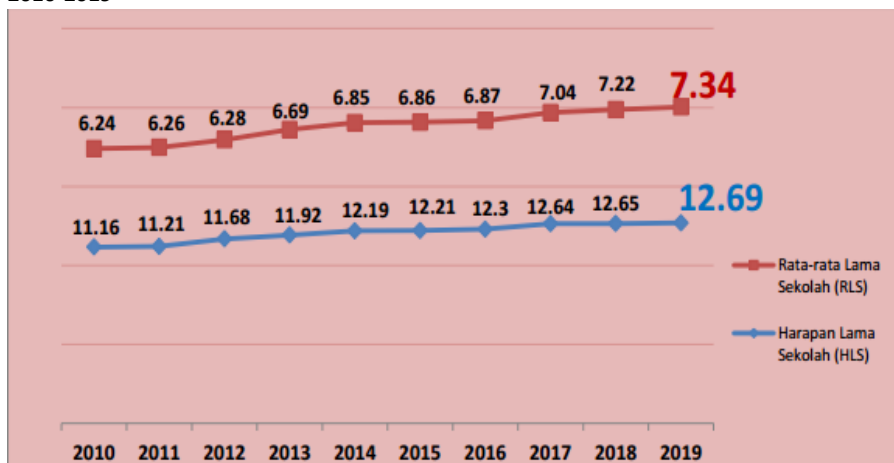
3.1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sragen telah meningkat sebesar 1,53 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 1,10 tahun. Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,52 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sragen telah mencapai 12,69 atau mendekati 13 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk

usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Sragen tumbuh 1,96 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Sragen yang lebih baik. Pada tahun 2019, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Sragen usia 25 tahun ke atas mencapai 7,34 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP

Gambar 3.3.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sragen, 2010-2019



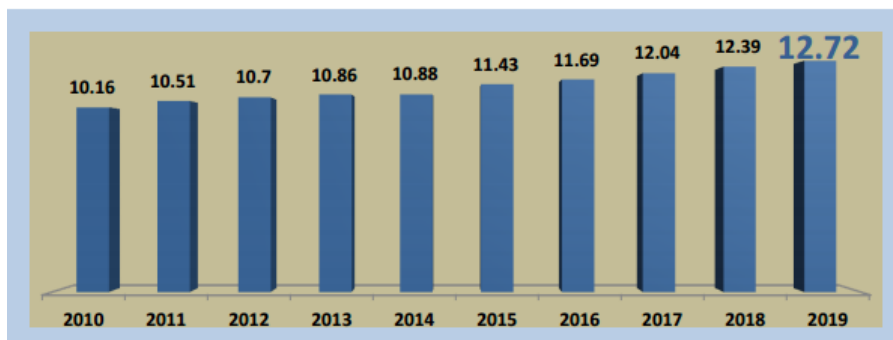
Sumber : Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Sragen tahun 2019

3.1.2. Pengeluaran Perkapita

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sragen mencapai Rp 12,72 juta per tahun, meningkat Rp 2,56 juta rupiah dibanding tahun 2010. Selama sembilan tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat secara rata-rata meningkat sebesar 2,80 persen per tahun.

Gambar 3.4

Pengeluaran per Kapita Per Tahun Kabupaten Sragen, 2010–2019 (juta rupiah)



Sumber : Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Sragen tahun 2019

3.1.4. IPM Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah cukup bervariasi. IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berkisar antara 66,12 (Kabupaten Brebes) hingga 83,19 (Kota Semarang). Sedangkan untuk Kabupaten Sragen sebesar 73,43 atau berada pada tigabelas tertinggi se-Jawa Tengah. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 69,04 tahun (Kabupaten Brebes) hingga 77,55 tahun (Kabupaten Sukoharjo) dan Kabupaten Sragen sebesar 75,62 tahun. Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sragen sebesar 12,69 yang berada antara nilai terendah 11,45 tahun (Kabupaten Banjarnegara) dan tertinggi 15,51 tahun (Kota Semarang). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berkisar antara 6,20 tahun (Kabupaten Brebes) hingga 10,54 tahun (Kota Surakarta), untuk Kabupaten Sragen tercatat sebesar 7,22 tahun. Pada pengeluaran per kapita (PPP) kabupaten/kota di Jawa Tengah berkisar antara 8,55 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pemalang) hingga 15,94 juta rupiah per tahun (Kota Salatiga) untuk Kabupaten Sragen berada pada besaran 12,39 juta rupiah per tahun. Kemajuan pembangunan manusia di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia. Selama 2010-2019, terdapat pergeseran jumlah Kabupaten/Kota yang berstatus “tinggi”, dari 7 Kabupaten/Kota yang berstatus “tinggi” pada tahun 2010, menjadi 16 Kabupaten/Kota yang berstatus “tinggi” dan 3 Kabupaten/Kota yang berstatus “sangat tinggi” pada tahun 2019. Selain dapat dilihat dari pergeseran status, Kemajuan pembangunan manusia di kabupaten/kota di Jawa Tengah juga terlihat dari rata-rata IPM per status. .

Tabel 3.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Jawa Tengah, 2018-2019

Kabupaten/Kota	UHH (tahun)		EYS (tahun)		MYS (tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JAWA TENGAH	74,18	74,23	12,63	12,68	7,35	7,53	10.777	11.102	71,12	71,73
Cilacap	73,39	73,52	12,48	12,49	6,92	6,93	10.274	10.639	69,56	69,98
Banyumas	73,45	73,55	12,64	12,82	7,41	7,42	11.240	11.703	71,30	71,96
Purbalingga	72,98	73,02	11,95	11,98	7,00	7,14	9.786	10.131	68,41	68,99
Banjarnegara	73,91	74,01	11,42	11,45	6,28	6,50	9.160	9.547	66,54	67,34
Kebumen	73,11	73,22	12,91	13,04	7,34	7,53	8.757	9.066	68,80	69,60
Purworejo	74,40	74,52	13,48	13,49	7,70	7,91	10.048	10.342	71,87	72,50
Wonosobo	71,46	71,60	11,69	11,74	6,75	6,76	10.503	10.871	67,81	68,27
Magelang	73,47	73,56	12,48	12,53	7,57	7,77	9.025	9.387	69,11	69,87
Boyolali	75,79	75,83	12,16	12,43	7,55	7,56	12.758	13.079	73,22	73,80
Klaten	76,67	76,68	13,13	13,24	8,24	8,31	11.738	12.074	74,79	75,29
Sukoharjo	77,54	77,55	13,81	13,82	8,84	9,10	11.100	11.557	76,07	76,84
Wonogiri	76,05	76,07	12,45	12,48	6,88	7,04	9.117	9.426	69,37	69,98
Karanganyar	77,36	77,38	13,66	13,67	8,51	8,52	11.223	11.569	75,54	75,89
Sragen	75,60	75,62	12,65	12,69	7,22	7,34	12.391	12.720	72,96	73,43
Grobogan	74,55	74,61	12,28	12,29	6,67	6,86	10.097	10.350	69,32	69,86
Blora	74,12	74,23	12,14	12,19	6,46	6,58	9.385	9.795	67,95	68,65
Rembang	74,39	74,43	12,05	12,1	6,95	7,15	10.191	10.551	69,46	70,15
Pati	75,93	76,04	12,30	12,41	7,18	7,19	10.190	10.660	70,71	71,35
Kudus	76,47	76,50	13,21	13,22	8,62	8,63	10.979	11.318	74,58	74,94
Jepara	75,71	75,74	12,71	12,74	7,43	7,44	10.169	10.609	71,38	71,88
Demak	75,29	75,31	12,86	13,01	7,48	7,55	10.001	10.344	71,26	71,87
Semarang	75,62	75,63	12,85	12,94	7,88	8,01	11.807	12.116	73,61	74,14
Temanggung	75,47	75,48	12,08	12,13	6,94	7,15	9.142	9.489	68,83	69,56
Kendal	74,30	74,33	12,70	12,8	7,05	7,25	11.257	11.597	71,28	71,97
Batang	74,56	74,59	11,88	12,00	6,62	6,63	9.203	9.573	67,86	68,42
Pekalongan	73,53	73,57	12,17	12,4	6,74	6,88	10.221	10.508	68,97	69,71
Pemalang	73,11	73,22	11,91	11,94	6,32	6,41	8.186	8.546	65,67	66,32
Tegal	71,28	71,40	12,34	12,58	6,70	6,86	9.433	9.798	67,33	68,24
Brebes	68,84	69,04	12,02	12,03	6,19	6,20	9.890	10.238	65,68	66,12
Kota Magelang	76,72	76,75	13,80	13,81	10,31	10,33	11.994	12.514	78,31	78,80
Kota Surakarta	77,11	77,12	14,52	14,55	10,53	10,54	14.528	15.049	81,46	81,86
Kota Salatiga	77,11	77,22	15,00	15,34	10,40	10,41	15.464	15.944	82,41	83,12
Kota Semarang	77,23	77,25	15,50	15,51	10,51	10,52	14.895	15.550	82,72	83,19
Kota Pekalongan	74,25	74,28	12,79	12,83	8,57	8,71	12.312	12.680	74,24	74,77
Kota Tegal	74,30	74,34	12,90	13,04	8,30	8,31	12.830	13.250	74,44	74,93

Sumber : Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Sragen Tahun 2019

Rata-rata IPM berstatus “sedang” mengalami peningkatan dari 68,17 di tahun 2018 menjadi 68,73 di tahun 2019. Demikian juga rata-rata IPM berstatus “tinggi” meningkat

sebesar 0,55 poin dari 73,47 di tahun 2018 menjadi 73,79 di tahun 2019. Rata-rata IPM berstatus “sangat tinggi” mengalami peningkatan dari 82,19 di tahun 2018 menjadi 82,72 di tahun 2019. Tiga wilayah yang memiliki status IPM “sangat tinggi” masih sama seperti periode sebelumnya, yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang

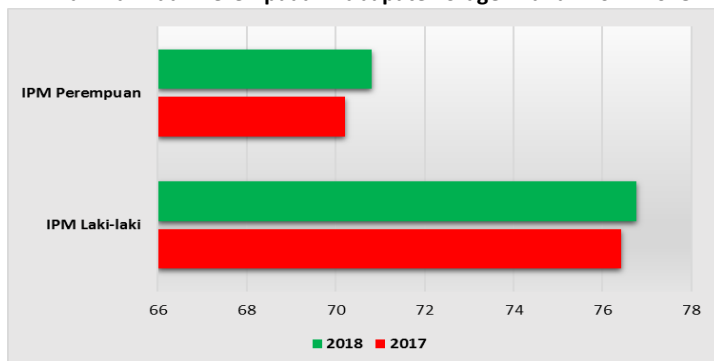
3.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sragen :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, UNDP merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Tingkat IPM perempuan di Kabupaten Sragen masih berada di bawah laki-laki, meskipun begitu IPM perempuan mengalami peningkatan. IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80), sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang (antara 60 sampai dengan 70).

Gambar 3.5

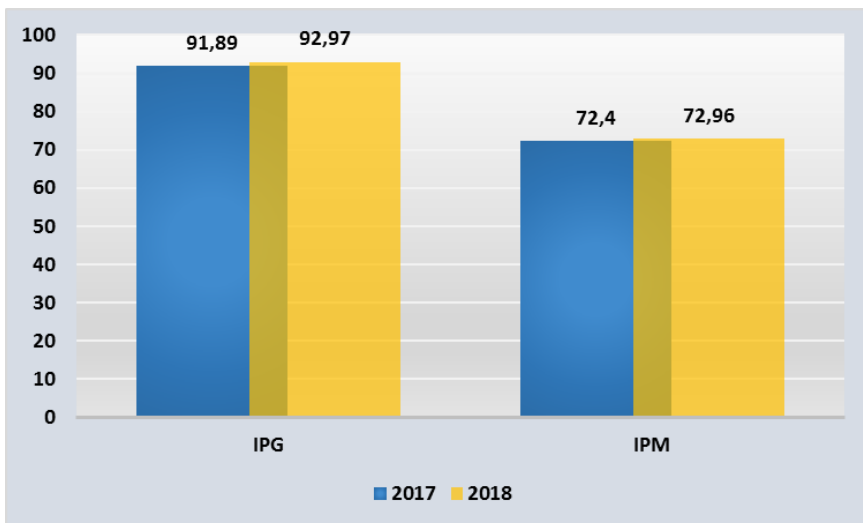
IPM Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Gambar 3.6

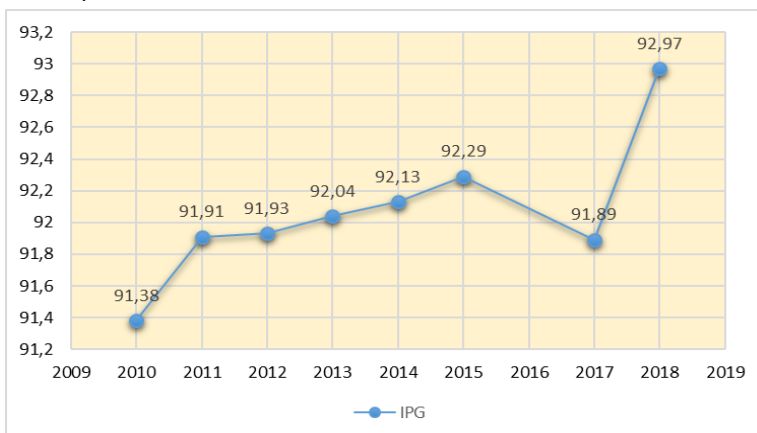
IPG dan IPM Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Gambar 3.7

IPG Kabupaten Sragen Tahun 2010-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan yang secara umum lebih rendah dibanding laki-laki. Namun demikian, jika dilihat

perkembangannya nilai IPM wanita mengalami peningkatan lebih cepat dari laki-laki (Lihat Gambar 3.5) . Sebagai akibatnya, IPG Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 nilainya mencapai 92,97, meningkat sebesar 0,06 poin dibanding tahun 2017 (Lihat Gambar 3.6). IPG sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh pertumbuhan IPM Perempuan yang kalah cepat dibanding IPM Laki-laki. Pada tahun 2018, pembangunan gender di kabupaten Sragen kembali meningkat. Peningkatan IPG disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2017-2018. IPM perempuan tumbuh, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki dibanding tahun sebelumnya. IPG Sragen tahun 2018 adalah IPG tertinggi sepanjang tahun 2010-2018 (Gambar 3.7).

3.2.1. Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-Laki

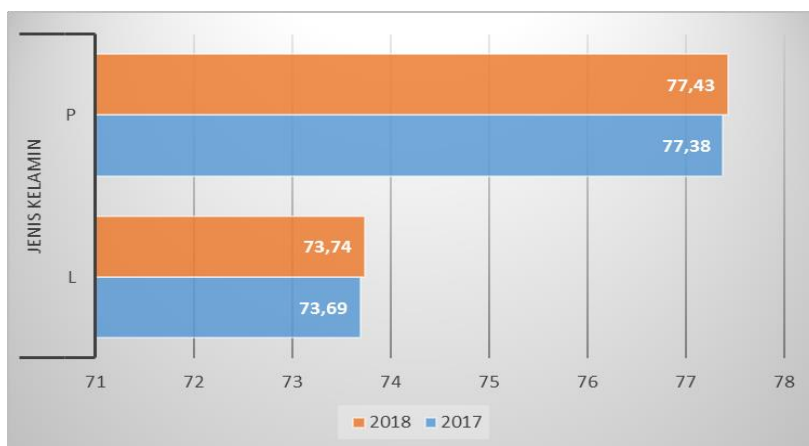
Secara genetis, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Kabupaten Sragen yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki. Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lanjut usia (lansia) yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

Dalam pengukuran IPM, indeks kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum umur harapan hidup (UHH) laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Sedangkan untuk nilai minimum UHH laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 17,5 dan 22,5 tahun. Angka tersebut mengikuti standar yang ditetapkan UNDP.

Selama periode tahun 2017-2018, harapan hidup penduduk di Kabupaten Sragen baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan. Gambar 3.8 menunjukkan tren UHH perempuan di Kabupaten Sragen selalu di atas UHH laki-laki. Pada tahun 2018 UHH perempuan sebesar 77,43 tahun, lebih besar dibanding UHH laki-laki yang berada di level 73,74 tahun. Selain memiliki level yang lebih tinggi, pada tahun 2018, pertumbuhan UHH perempuan juga lebih besar dibanding laki-laki. UHH perempuan tumbuh lebih cepat dibanding UHH laki-laki yang meningkat dibanding tahun 2017. Capaian ini menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap peningkatan IPG tahun 2018.

Gambar 3.8.

Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018



Sumber: Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Tabel 3.3.

Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2019

Karakteristik	5 tahun ke atas
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	16,35
Perempuan	16,86
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	14,97
40 Persen Tengah	17,11
20 Persen Teratas	18,87
Kabupaten Sragen	16,61

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sragen Tahun 2019

Selain dari sisi harapan hidup, perbedaan derajat kesehatan antar gender juga dapat dilihat dari beberapa indikator lain. Kenyataan tentang harapan hidup perempuan yang lebih lama dibanding laki-laki didukung oleh beberapa indikator kesehatan. Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa meskipun angka kesakitan dan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, namun persentase penduduk yang mengalami sakit parah lebih banyak ditemukan pada

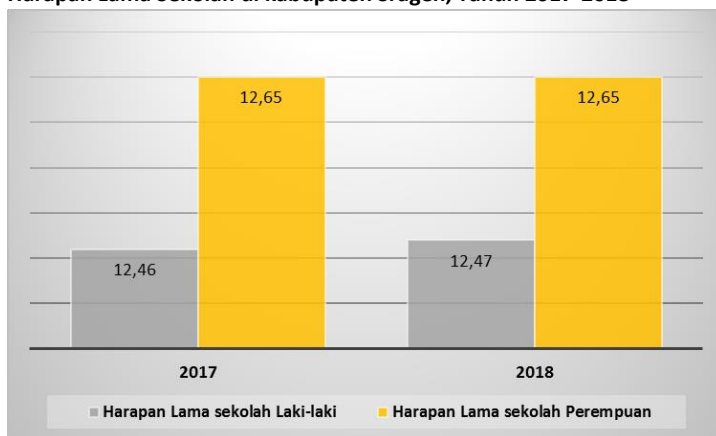
laki-laki dibanding perempuan. Hasil penelitian Stefan Ek (2015) mengungkap bahwa perempuan menaruh perhatian dan rasa keingintahuan yang lebih besar dibanding laki-laki mengenai kesehatan serta lebih memperhatikan barang-barang yang mereka beli yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, laki-laki dinilai lebih rentan untuk terjangkit penyakit kronis seperti sirosis hati, jantung dan kanker dibanding perempuan (Waldron dan Johnston, 2010).

3.2.2. Laki-laki dan Perempuan Memiliki Peluang Sama untuk Mengenyam Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Nawa Cita. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, dimensi pendidikan diwakili oleh dua indikator, salah satunya harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas.

Gambar 3.9

Harapan Lama Sekolah di kabupaten Sragen, Tahun 2017-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Di Kabupaten Sragen harapan lama sekolah baik total maupun terpilah gender mengalami peningkatan pada periode 2017-2018. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 sekolah menengah atas/ sederajat. Selama dua tahun terakhir,

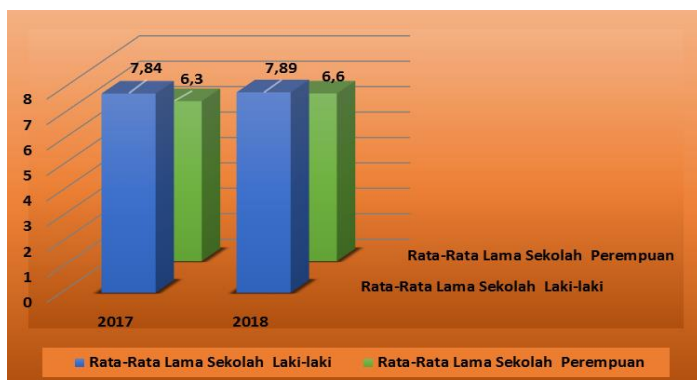
perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,65 tahun, sebesar 0,18 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,47 tahun.

3.2.3. Realita Capaian Pendidikan Antargender Masih Timpang

Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menghitung lama tahun sekolah secara rata-rata bagi penduduk yang berumur tahun ke atas, berbeda dengan harapan lama sekolah yang dihitung pada penduduk umur 7 tahun ke atas. Angka ini mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di beberapa periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pendidikan jangka panjang.

Gambar 3.10

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sragen, Tahun 2017-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sragen baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2018, terjadi perbedaan hampir 1 tahun capaian indikator ini antargender. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 7,89 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 6,6 tahun.

Dalam periode tahun 2017-2018, tren menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan selalu berada di bawah capaian laki-laki. Namun pada RLS perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Pada tahun 2018, RLS perempuan mampu tumbuh sebesar 1,51 persen dibandingkan capaiannya pada tahun 2017, sedangkan laki-laki meningkat 1,13 persen saja. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan RLS perempuan antartahun bernilai lebih besar dibanding pertumbuhan RLS laki-laki. Hal ini

yang menyebabkan kesenjangan RLS antargender menurun dari waktu ke waktu. Selain itu, RLS perempuan yang lebih cepat tumbuh dibanding laki-laki menjadi salah satu hal yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2018.

Fenomena peningkatan rata-rata lama sekolah serta penurunan kesenjangan indikator tersebut antara laki-laki dan perempuan didukung oleh indikator pendidikan lain. Rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian dalam hal pendidikan penduduk dengan umur 25 tahun ke atas yang diasumsikan telah menyelesaikan fase bersekolah. Rata-rata lama sekolah yang dicapai tahun 2018 merupakan dampak dari partisipasi sekolah penduduk di beberapa periode tahun yang lalu. Dilihat dari partisipasi sekolah perempuan umur 7-18 tahun, rasio partisipasi sekolah perempuan dibanding laki-laki menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Capaian ini memberikan optimisme bahwa dalam beberapa periode tahun ke depan, rata-rata lama sekolah perempuan akan menyamai laki-laki, atau dengan kata lain kesetaraan capaian pendidikan antargender akan tercapai.

3.2.4. Ekonomi Sragen Secara Umum Masih Didominasi Laki-laki

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan adalah faktor ekonomi. Seringkali keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan gender. Selain tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kelima tentang kesetaraan gender, isu ekonomi juga menjadi fokus pada tujuan kesepuluh yakni “mengurangi kesenjangan”, termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

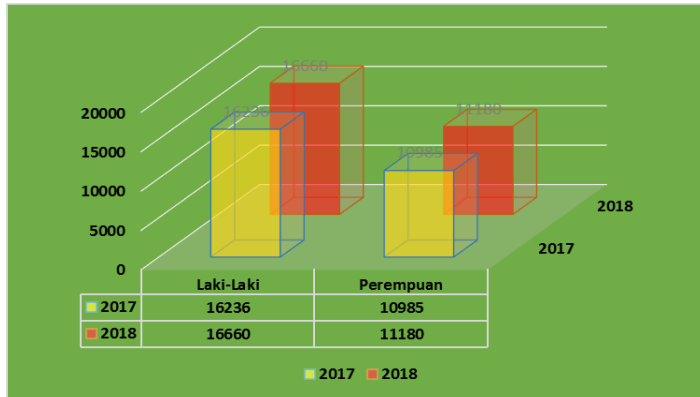
Dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi, UNDP menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita, namun karena keterbatasan data yang dimiliki, indikator tersebut diproksi menggunakan pengeluaran perkapita. Untuk tujuan analisis perbedaan capaian tersebut antara laki-laki dan perempuan, dalam Gambar 3.11 disajikan perkembangan pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin dalam kurun waktu 2017-2018 di Kabupaten Sragen.

Dari tahun 2017 hingga 2018, terjadi kesenjangan pengeluaran perkapita yang cukup berarti antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 10.895.000 pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 11.180.000 per tahun.

Kesenjangan dari sisi ekonomi juga dapat dilihat dari rasio pengeluaran perkapita perempuan dan laki-laki. Selama periode tahun 2017-2018, rasio ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti, berkisar antara 0,55 hingga 0,60. Pada tahun 2018, rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap laki-laki berada pada angka 0,59 yang berarti pengeluaran perkapita perempuan hanya sekitar hampir 60 persen saja dari pengeluaran perkapita laki-laki

Gambar 3.11

**Perkembangan Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin (dalam ribuan)
Di kabupaten Sragen Tahun 2017-2018**



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Salah satu penyebab lebarnya kesenjangan pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan adalah *share* perempuan yang relatif rendah pada beberapa lapangan usaha dengan produktivitasnya tinggi. Sektor-sektor produktif seperti pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi serta real estat mayoritas diisi oleh tenaga kerja laki-laki. Bahkan pada sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan produktivitas tertinggi ketiga, persentase tenaga kerja perempuannya tidak mencapai 10 persen. Perempuan di Indonesia cenderung bekerja di sektor jasa, penyediaan akomodasi dan perdagangan dengan tingkat produktivitas yang tidak begitu tinggi.

Perbedaan yang cukup tinggi pada pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan selama ini, secara langsung disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang diterima. Upah yang diterima oleh pekerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Fakta mengenai kesenjangan ekonomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sudah berlangsung sejak lama. Diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja serta kurangnya pendidikan dan kompetensi yang dimiliki perempuan berkontribusi terhadap masalah ini. Diperlukan usaha serta kebijakan di berbagai aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM perempuan dari sisi pendidikan dan keterampilan untuk perlahan mengurangi masalah disparitas ekonomi yang terjadi.

3.3. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berada pada angka 91,95, ini berarti IPG Kabupaten Sragen lebih tinggi daripada IPG Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian IPG Kabupate Sragen masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPG Kota Surakarta yang memiliki angka 96, 02. Berikut adalah posisi Kabupaten Sragen di antara kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.4

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JAWA TENGAH	72.28	76.10	12.62	12.64	7.86	6.87	14822	9603	75.13	69.08	91.95
CILACAP	71.43	75.23	12.92	12.45	7.41	6.45	15151	7012	74.67	64.61	86.53
BANYUMAS	71.50	75.26	12.89	12.64	7.94	7.12	16014	7731	75.90	66.75	87.94
PURBALINGGA	71.02	74.83	12.18	11.74	7.43	6.59	13245	9329	72.42	66.86	92.32
BANJARNEGARA	71.99	75.73	11.41	11.48	6.58	6.09	10208	8230	68.27	64.98	95.18
KEBUMEN	71.15	74.96	12.88	13.35	7.94	6.87	11396	8037	72.49	67.48	93.09
PURWOREJO	72.52	76.16	13.62	13.31	8.43	7.34	11113	9771	74.25	70.62	95.11
WONOSOBO	69.45	73.35	11.65	11.73	7.00	6.50	14156	9306	71.10	66.06	92.91
MAGELANG	71.52	75.29	12.43	12.93	8.00	7.17	12935	8202	73.48	67.77	92.23
BOYOLALI	73.94	77.69	11.90	12.40	8.45	6.85	17142	12419	77.22	72.00	93.24
KLATEN	74.87	78.58	12.97	13.35	8.93	7.65	12821	11334	76.71	73.64	96.00
SUKOHARJO	75.76	79.50	13.80	14.20	9.48	8.41	11944	10785	77.95	75.40	96.73
WONOGIRI	74.21	77.91	12.46	12.14	7.52	6.49	12560	8290	73.77	67.23	91.13
KARANGANYAR	75.58	79.21	13.31	13.74	9.31	7.91	11692	10947	76.93	74.32	96.61
SRAGEN	73.74	77.43	12.47	12.65	7.89	6.60	16660	11180	76.75	70.82	92.27
GROBOGAN	72.65	76.34	13.74	12.28	7.19	6.14	15072	7397	75.82	65.06	85.81
BLORA	72.22	75.90	12.87	12.14	6.99	5.96	13815	5737	73.54	61.62	83.79
REMBANG	72.50	76.17	12.08	11.69	7.53	6.41	15173	7142	74.37	64.32	86.49
PATI	74.08	77.81	12.57	12.30	7.77	6.64	14150	9438	75.33	68.93	91.50
KUDUS	74.66	78.44	13.17	13.21	9.19	8.09	14895	10351	78.65	73.06	92.89
JEPARA	73.86	77.70	12.69	12.76	7.81	6.80	14031	8334	75.34	68.30	90.66
DEMAK	73.45	77.18	12.72	13.09	8.26	6.82	14392	8549	76.04	68.74	90.40
SEMARANG	73.76	77.51	13.10	12.85	8.36	7.44	12508	11645	75.37	72.62	96.35
TEMANGGUNG	73.62	77.38	12.05	12.28	7.20	6.72	10700	8635	71.02	67.91	95.62
KENDAL	72.40	76.16	12.70	12.82	7.64	6.47	14708	10476	74.91	69.64	92.96
BATANG	72.66	76.47	11.92	11.68	7.32	6.16	12418	8030	72.09	65.35	90.65
PEKALONGAN	71.59	75.37	11.72	12.96	7.07	6.31	14266	8534	72.32	67.16	92.87
PEMALANG	71.15	74.96	11.99	11.77	6.90	5.75	12247	5702	70.79	60.52	85.49
TEGAL	69.24	73.22	12.89	12.03	7.30	6.09	14210	7349	72.88	63.37	86.95
BREBES	66.75	70.81	12.12	11.99	6.75	5.37	14637	6864	70.34	60.66	86.24

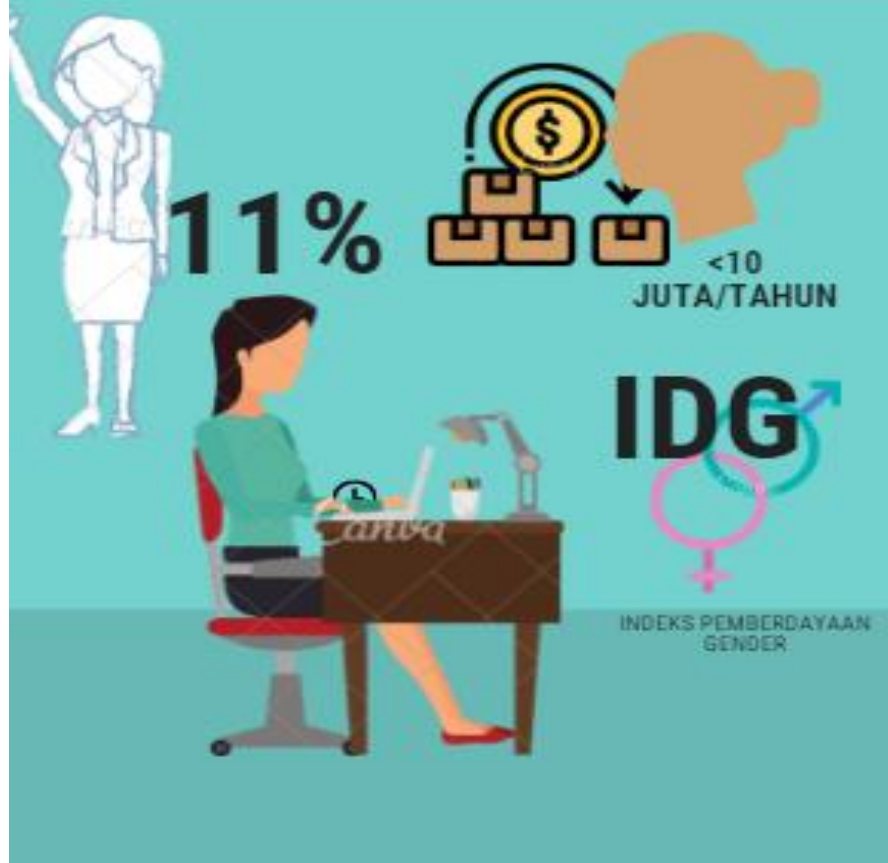
Tabel lanjutan...

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

KOTA MAGELANG	74.90	78.61	13.75	13.80	10.93	9.95	13356	11636	80.44	77.28	96.07
KOTA SURAKARTA	75.31	79.01	14.43	14.58	11.09	10.01	14673	13493	82.47	79.85	96.82
KOTA SALATIGA	75.31	78.97	14.90	15.01	10.91	9.93	19219	14999	85.41	81.24	95.12
KOTA SEMARANG	75.44	79.15	15.70	15.21	11.29	10.14	15706	14125	84.71	81.17	95.82
KOTA PEKALONGAN	72.36	76.03	12.68	12.80	8.94	8.22	16073	12037	77.44	73.25	94.59
KOTA TEGAL	72.40	76.25	12.67	13.08	8.69	7.71	17732	11941	78.02	72.91	93.45

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

KONDISI PEMBERDAYAAN GENDER



PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN SRAGEN

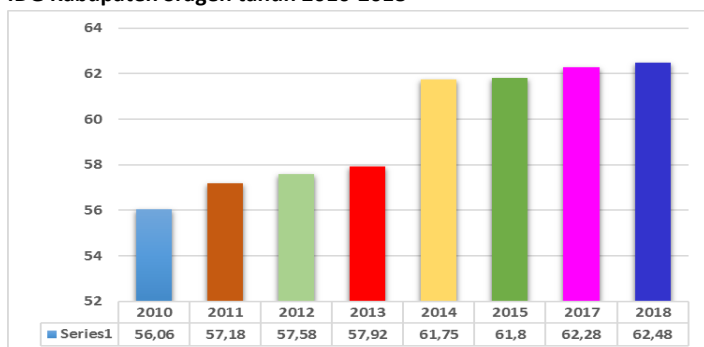
04

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Gambar 4.1

IDG Kabupaten Sragen tahun 2010-2018



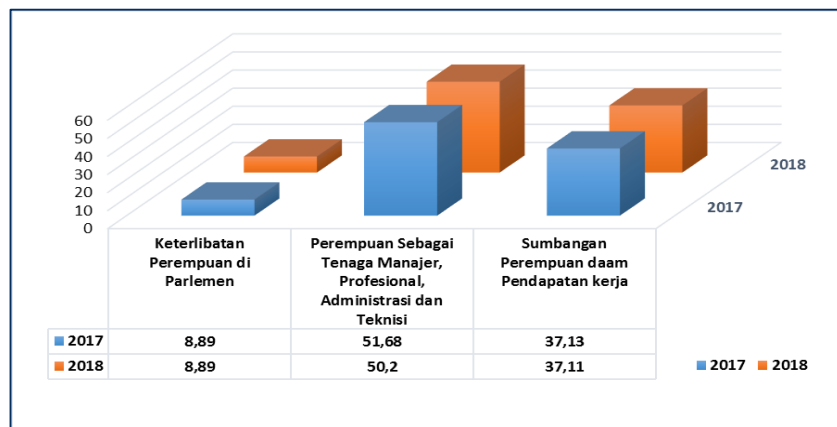
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

IDG Kabupaten Sragen Tahun 2018 terus meningkat dalam 8 tahun terakhir dan mencapai angka 62,48. Angka ini meningkat 0,20 poin dibanding tahun 2017. Pertumbuhan IDG pada periode 2017-2018 tidak secepat sebelumnya yang mencapai 0,68 poin

Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurun dari tahun sebelumnya dari 51,68 menjadi 50,2. Meski demikian, setidaknya angka IDG yang terus meningkat merupakan indikasi baik bagi kondisi kesetaraan gender di Indonesia.

Gambar 4.2

Perkembangan Komponen IDG Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

4.1. Kiprah Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia pada umumnya dan kabupaten Sragen pada khususnya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia. Untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Selain itu, isu keterwakilan perempuan juga menjadi hal penting yang tercantum dalam agenda kedua sub-agenda ketiga dari 9 sasaran utama di RPJMN 2015-2019 yaitu “Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan”.

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Keterwakilan perempuan di

parlemen menjadi salah satu indikator SDGs yang tercantum pada Target 5.5 “Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, dan Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Masyarakat”, indikator 5.5.1* “Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah”. Selain itu, isu keterwakilan perempuan juga menjadi hal penting yang tercantum dalam agenda kedua sub-agenda ketiga dari 9 sasaran utama di RPJMN 2015-2019 yaitu “Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan”.

Di Kabupaten Sragen, peran aktif perempuan dalam politik masih relatif rendah meskipun ada peningkatan. Pada pemilihan umum tahun 2014, hanya terdapat 8,89 persen anggota legislatif perempuan. Namun pada Pemilu 2019, meningkat menjadi 11,11%. Berdasarkan partai politiknya PDIP memiliki jumlah yang paling banyak.

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen, 2019

Nama Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Total
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	-	1
Keadilan Sejahtera (PKS)	6	-	6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	11	2	13
Partai Golongan Karya (Golkar)	6	-	6
Partai Gerakan Indonesia (Gerindra)	4	1	5
Partai Demokrat	4	1	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-
Partai Bulan Bintang (PBB)	6	1	7
Partai Hanura	-	-	-
Partai Amanat Nasional	2	-	2
Kabupaten Sragen	40	5	45

Sumber : BPS Kabupaten Sragen, 2020

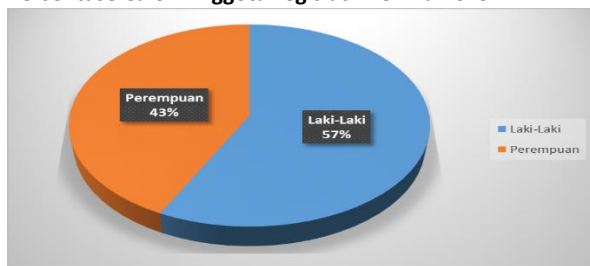
Selama ini, parlemen di Indonesia termasuk di Kabupaten Sragen masih didominasi oleh laki-laki. Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Pertama, telah terjadi proses depolitisasi yang sengaja dan sistemik terhadap perempuan. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad, perempuan pada umumnya masih buta politik; kedua, umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan

Indonesia yang demokratis; ketiga, umumnya perempuan belum memahami hak asasi mereka, termasuk hak asasi dalam bidang politik dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak tersebut; keempat, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana (Muslidah Mulia, 2008). Menurut UNDP (2010), dominasi elit politik yang mayoritas laki-laki juga menghambat partisipasi perempuan di dunia politik khususnya di dalam struktur partai. Marjinalisasi pada perempuan yang terjadi pada struktur partai, menghambat perempuan dalam memengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan terlebih dalam melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Ranah politik menjadi bidang yang masih diperjuangkan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Masuknya perempuan di ranah politik di Indonesia pada awalnya masih sangat minim, sehingga pemerintah mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dengan kebijakan afirmative action. Di Kabupaten Sragen keterwakilan perempuan di ranah politik khususnya politik formal menjadi perhatian dalam rangka pembangunan pro gender. Sayangnya perbandingan perempuan dan laki-laki dalam politik di Kabupaten Sragen masih didominasi oleh laki-laki.

Gambar 4.3

Persentase Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah calon legislatif (caleg) laki-laki di Kabupaten Sragen sebanyak 263 atau 57,5% dari total caleg seluruh Kabupaten Sragen sebesar 457. Jumlah caleg perempuan di Kabupaten Sragen tahun 2019 sebanyak 42,5%. Angka tersebut sudah menunjukkan pencapaian kuota 30% bagi caleg perempuan yang maju dalam pesta demokrasi atau pemilihan legislatif. Namun sayangnya hasil pemilihan menunjukkan bahwa perempuan tersingkir dalam posisi strategis pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen. Pada kepemimpinan DPRD Kabupaten Sragen saat ini dipimpin oleh laki-laki. Untuk jumlah anggota DPRD perbandingannya adalah 11% perempuan dan 89% berjenis kelamin laki-laki. Besarnya angka peserta calon legislatif

dari kelompok perempuan yang tidak berbanding lurus dengan anggota legislatif terpilih dari kelompok perempuan perlu dikaji lebih mendalam pada faktor penyebabnya. Keterwakilan perempuan di Kabupaten Sragen pada ranah legislatif perlu ditingkatkan kembali, mengingat kondisi data pada tahun 2019 belum mencapai kuota afirmasi 30% bagi perempuan.

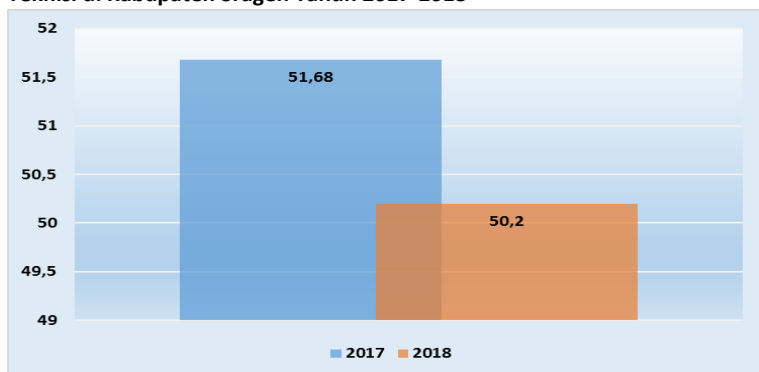
Pada posisi strategis di lembaga yudikatif jumlah antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda pada setiap instansi. Pada ranah yudikatif masih didominasi oleh laki-laki. Data tahun 2019 di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa jumlah hakim laki-laki di pengadilan tinggi/negeri sebanyak 62,5% atau 5 hakim laki-laki dari total hakim yang ada. Sedangkan hakim perempuan di pengadilan tinggi/negeri Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebanyak 3 orang atau 37,5%. Pejabat di pengadilan tinggi/negeri Kabupaten Sragen pada tahun 2019 juga didominasi laki-laki yakni sebesar 67% (4 orang) dan sedangkan pejabat perempuan di pengadilan tinggi/negeri sebesar 34% (2 orang). Jumlah jaksa laki-laki dan perempuan sama 8 orang pada masing-masing jenis kelamin. Lalu, untuk posisi pejabat kejaksaan tinggi/negeri seluruhnya adalah laki-laki. Pengarusutamaan gender pada ranah yudikatif dalam hal keterwakilan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan pada posisi strategis bidang yudikatif perlu ditingkatkan kembali. Hal ini akan memberikan impact ke depannya dalam penanganan kasus-kasus ranah hukum yang adil gender.

Selanjutnya keterwakilan menurut jenis kelamin di lembaga kepolisian Kabupaten Sragen pada tahun 2019 juga masih didominasi oleh laki-laki. Tahun 2019 tercatat Korpala Polres/ Polrestabes Kabupaten Sragen adalah laki-laki, dengan 95% (19 orang) polisi kepala sektor (Kapolsek) adalah laki-laki dan polisi di wilayah Polres juga 95% (909) laki-laki serta 94% pejabat polisi di wilayah Polres juga laki-laki. Perempuan seakan belum mampu menembus batas budaya patriarki di bidang atau instansi ini. Sifat maskulinitas dalam budaya patriarki menempatkan laki-laki menjadi dominan dalam bidang kemandirian dan kepolisian. Padahal kepemimpinan perempuan juga dapat memiliki kapasitas yang sama apabila adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan.

4.2. Harapan akan Kesetaraan pada Pekerjaan Profesional

Faktor sosial budaya yang selama ini berkembang di Indonesia mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab di sektor domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik. Sebagian perempuan yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tak jauh dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi kerja perempuan terutama di sektor formal. Padahal partisipasi perempuan di sektor formal menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Corner, 2011).

Perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi dan Teknisi di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Pada tahun 2018, sebesar 50,2 persen dari pekerja profesional merupakan perempuan. Angka ini menurun 1,48 persen dibandingkan tahun 2017. Meski demikian, secara level, persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2017 masih berada di atas capaian tahun 2010-2015.

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pemerintahan salah dapat dilihat dari komposisi pegawai negeri sipil (PNS). Pada tahun 2018, PNS laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sragen sudah menunjukkan kondisi yang setara secara komposisi (Tabel 4.2). Bahkan jumlah PNS Perempuan lebih banyak daripada laki-laki (4409:4678). Meski demikian, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan masih relatif kecil. Pasalnya, pada tahun 2018, hampir 70 persen pejabat struktural diduduki oleh kaum laki-laki.

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Negeri Dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 2018

NAMA INSTANSI (BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN KEPEGAWAIAN, DIKLAT	42	27	69
BADAN KESBANG, POL LINMASY.	23	6	29
BPBD	9	2	11
BPPKAD	47	38	85
BAPPEDA LITBANG	26	14	40
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	19	13	32
DINAS DUKAPIL	21	12	33
DINAS KESEHATAN	247	900	1147

DINAS KETAHANAN PANGAN	77	32	109
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	26	11	37
DINAS KOPERASI, UKM	26	20	46
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	107	25	132
DINAS PUPR	184	24	208
DINAS PEMBERDAYAAN MASY. & DESA	19	17	36
DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA	31	14	45
DPM & PTSP	18	19	37
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2214	2817	5031
DINAS PPKB & PEMBERDAYAAN ERP & PERL. ANAK	22	18	40
DINAS PERHUBUNGAN	60	8	68
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	134	39	173
DINAS PERTANIAN	29	12	41
DISPERKIM	66	16	82
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	51	20	71
DINAS SOSIAL	19	20	39
DINAS TENAGA KERJA	57	22	79
INSPEKTORAT	21	23	44
KECAMATAN GEMOLONG	32	9	41
KECAMATAN GESI	16	1	17
KECAMATAN GONDANG	14	4	18
KECAMATAN JENAR	18	1	19
KECAMATAN KALIJAMBE	21	4	25
KECAMATAN KARANGMALANG	25	10	35
KECAMATAN KEDAWUNG	20	6	26
KECAMATAN MASARAN	20	6	26
KECAMATAN MIRI	12	5	17
KECAMATAN MONDOKAN	16	1	17
KECAMATAN NGRAMPAL	17	5	22
KECAMATAN PLUPUH	19	5	24
KECAMATAN SAMBIREJO	19	3	22
KECAMATAN SAMBUNGMACAN	14	6	20
KECAMATAN SIDOHARJO	17	7	24
KECAMATAN SRAGEN	48	21	69
KECAMATAN SUKODONO	13	1	14
KECAMATAN SUMBERLAWANG	17	3	20
KECAMATAN TANGEN	15	2	17
KECAMATAN TANON	16	5	21
RSUD DR. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN	163	256	419
RSUD DR. SOERATNO GEMOLONG	34	63	97

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62	8	70
SEKRETARIAT DAERAH	129	73	202
SEKRETARIAT DPRD	37	4	41
JUMLAH / TOTAL	4409	4678	9087

Sumber : Kabupaten Sragen dalam Angka, 2020

Isu mengenai peran serta perempuan dalam pekerjaan yang bersifat profesional telah lama dibahas. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian ini juga sudah dilakukan. Kurang dari 4 persen lagi untuk mencapai kondisi yang setara di tenaga profesional. Namun ada hal yang tak kalah penting untuk disoroti seperti tersentralnya pekerja profesional perempuan di beberapa pekerjaan.

Menurut *Department for Professional Employees*, mayoritas pekerja profesional perempuan berada di sektor yang memang secara budaya dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Sementara itu, kurang dari 25 persen pekerja perempuan yang menggeluti bidang teknologi informasi, matematika dan arsitektur. Data dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyebutkan bahwa dunia sains dianggap belum ramah bagi perempuan. Persentase peneliti perempuan di Indonesia masih sekitar 30 persen, terpaut cukup jauh jika dibandingkan laki-laki. Tersentralnya pekerja perempuan di bidang-bidang tertentu disebabkan oleh anggapan tentang pekerjaan tersebut yang “cukup ramah” bagi perempuan terutama bagi mereka yang sudah menikah dan memiliki anak. Rendahnya partisipasi perempuan di beberapa sektor pekerjaan profesional juga akan berdampak signifikan pada kesenjangan pendapatan jika sektor-sektor yang banyak terisi perempuan memiliki produktivitas yang relatif rendah.

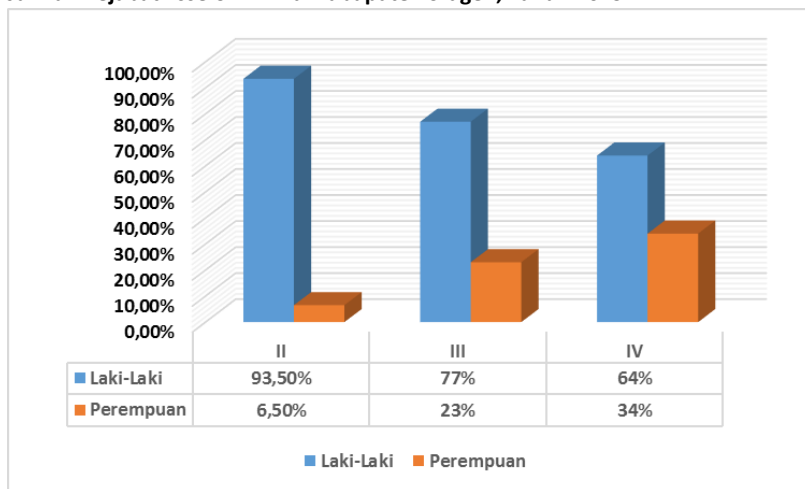
Kabupaten Sragen saat ini dipimpin oleh Bupati Perempuan yakni Ibu dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dengan Wakil Bupati laki-laki Bapak Dedy Endriyatno, S.E. kepemimpinan Ibu Yuni tentu saja menjadi energi positif bagi Kabupaten Sragen dalam membawa kebijakan-kebijakan pro gender di Kabupaten Sragen. Hal ini juga menjadi energi dalam rangka pembangunan nasional dalam pengarusutamaan gender, di mana tidak banyak juga pemimpin daerah perempuan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pada jajaran pejabat eselon dari eselon IV sampai dengan eselon II juga didominasi oleh laki-laki. Perempuan pada posisi eselon IV di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 tercatat sebesar 34% (196 orang) lebih kecil dibandingkan pejabat eselon IV laki-lakinya yakni sebesar 66% (378 orang). Pada posisi pejabat eselon IV di Kabupaten Sragen tahun 2019 adalah laki-laki dan perempuannya sebesar 6.5% (2 orang). Pada posisi eselon III jumlah perempuan semakin kecil yakni 23% (40 orang) sedangkan yang laki-laki sebesar 77% (132 orang). Lalu pada posisi pejabat eselon II jumlah perempuan semakin mengecil yakni hanya 6.5% atau hanya 2 orang dari total 31 pejabat eselon II di Kabupaten Sragen pada tahun 2019. Jumlah pejabat eselon II berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang atau mencapai 93.5%. Khusus pada pejabat eselon II di organisasi perangkat daerah PPPA diduduki oleh laki-laki, pada posisi jabatan eselon III OPD PPPA terdapat 2 laki-laki dan 2 perempuan.

Sedangkan pada posisi jabatan eselon IV Organisasi Perangkat Daerah PPPA laki-laki sebesar 27% dan perempuan sebesar 73%.

Gambar 4.5

Jumlah Pejabat Esselon II-IV di kabupaten Sragen, Tahun 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

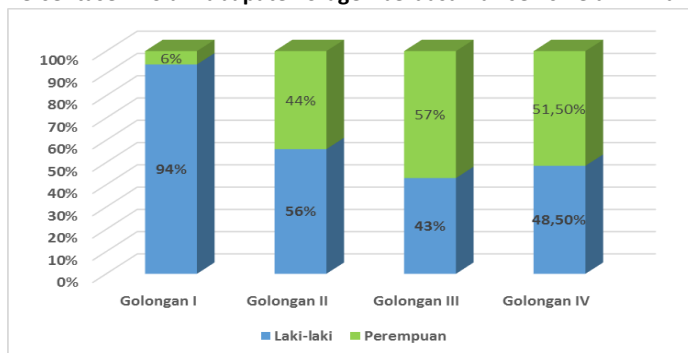
Berbeda pada kondisi dalam posisi strategis pejabat publik, keterwakilan perempuan di ranah publik aparatur sipil negara mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada kelompok pegawai golongan I jumlah pegawai perempuan adalah 6% (10 orang) sedangkan pegawai golongan I pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 152 orang atau 94%. Pada golongan II jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan pada kelompok golongan I yakni terdapat 44% perempuan di kelompok pegawai golongan II sedangkan laki-laki sebesar 56%. Lalu pada jenjang pegawai golongan III di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.255 orang atau 57%-nya adalah perempuan dan laki-laki sebesar 43%. Pada kelompok pegawai golongan IV terdapat pegawai perempuan sebanyak 1.620 atau 51.5% sedangkan laki-lakinya sejumlah 48.5% (lihat Gambar 4.6)

Khusus pada posisi pemimpin di wilayah Desa dan Kecamatan, Camat terdapat 95% (19 orang) camat laki-laki di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebanyak 95% atau 19 orang dari total 20 camat diseluruh wilayah Kabupaten Sragen, maka sisanya ada 1 orang camat perempuan. Untuk jabatan kepala desa/kelurahan perempuan lurah desa atau kepala desa ada 2% (4 orang) sedangkan lurah atau kepala desa laki-laki sebanyak 98% (204 orang). Kenaikan jumlah perempuan dari kelompok pegawai golongan I sampai dengan golongan IV menunjukkan adanya kesempatan yang luas dan terbuka bagi jenis kelamin perempuan untuk memasuki ranah publik bidang aparatur sipil negara. Namun ketika sampai pada

posisi strategis pejabat eselon keterwakilan tersebut menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian pada akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang dimiliki oleh perempuan dalam pengembangan karir dan promosi jabatannya. Harapannya jumlah pejabat eselon perempuan dari eselon IV hingga eselon II tidak terus mengalami penurunan pada level jabatan yang lebih tinggi. Keterwakilan perempuan dalam setiap jenjang jabatan publik dapat menjadi tanda masih adanya ketimpangan gender di ranah publik. Begitu pula pada posisi pimpinan daerah di level kecamatan dan desa/kelurahan.

Gambar 4.6.

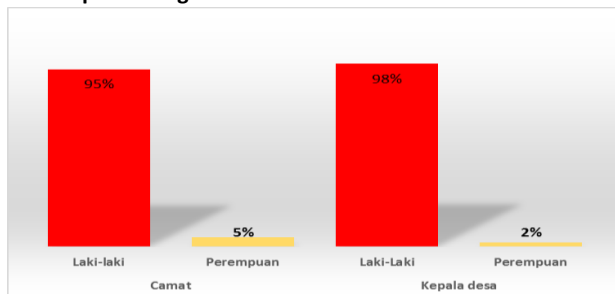
Persentase PNS di Kabupaten Sragen berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

Gambar 4.7.

Persentase Camat dan Kepala Desa Berdasarkan Jenis kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

Pada posisi strategis di lembaga yudikatif jumlah antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda pada setiap instansi. Pada ranah yudikatif masih didominasi oleh laki-laki. Data tahun 2019 di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa jumlah hakim laki-laki di

pengadilan tinggi/negeri sebanyak 62,5% atau 5 hakim laki-laki dari total hakim yang ada. Sedangkan hakim perempuan di pengadilan tinggi/negeri Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebanyak 3 orang atau 37.5%. Pejabat di pengadilan negeri Kabupaten Sragen pada tahun 2019 juga didominasi laki-laki yakni sebesar 67% (4 orang) dan sedangkan pejabat perempuan di pengadilan tinggi/negeri sebesar 34% (2 orang). Jumlah jaksa laki-laki dan perempuan sama 8 orang pada masing-masing jenis kelamin. Lalu, untuk posisi pejabat kejaksaan tinggi/negeri seluruhnya adalah laki-laki. Pengarusutamaan gender pada ranah yudikatif dalam hal keterwakilan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan pada posisi strategis bidang yudikatif perlu ditingkatkan kembali. Hal ini akan memberikan impact ke depannya dalam penanganan kasus-kasus ranah hukum yang adil gender.

Selanjutnya keterwakilan menurut jenis kelamin di lembaga kepolisian Kabupaten Sragen pada tahun 2019 juga masih didominasi oleh laki-laki. Tahun 2019 tercatat Krpala Polres/Polrestabes Kabupaten Sragen adalah laki-laki, dengan 95% (19 orang) polisi kepala sektor (Kapolsek) adalah laki-laki dan polisi di wilayah Polres juga 95% (909) laki-laki serta 94% pejabat polisi di wilayah Polres juga laki-laki. Perempuan seakan belum mampu menembus batas budaya patriaki di bidang atau instansi ini. Sifat maskulinitas dalam budaya patriaki menempatkan laki-laki menjadi dominan dalam bidanh kemanan dan kepolisian. Padahal kepemimpinan perempuan juga dapat memiliki kapasitas yang sama apabila adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.3

Persentase Pejabat di lembaga Yudikatif Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik (1)	Prosesntase (2)
Hakim	
Laki-laki	62,5
Perempuan	37,5
Jaksa	
Laki-laki	50
Perempuan	50
Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	
Laki-laki	95
Perempuan	5
Pejabat Pengadilan Negeri	
Laki-laki	67
Perempuan	33

Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

4.3. Kontribusi Perempuan dalam Penciptaan Pendapatan Semakin Diperhitungkan

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai. Meski menunjukkan capaian yang jauh lebih rendah di berbagai indikator ekonomi dan tenaga kerja, namun peran perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Gambar 4.8

**Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Di Kabupaten Sragen
Tahun 2017 dan 2018**



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan Gambar 4.4, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 37,11 persen. Angka ini menurun 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya. Meski masih terpacut cukup jauh dari laki-laki, namun peningkatan yang terus terjadi pada indikator ini menjadi sinyal positif perbaikan kondisi kesetaraan gender dalam ekonomi. Penurunan sumbangan pendapatan perempuan mengindikasikan kualitas perempuan perlu mendapat perhatian pada pasar tenaga kerja. Kontribusi perempuan dalam penciptaan pendapatan dianggap masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diskriminasi gender dalam pemberian upah menjadi salah satunya. Menurut Wolfe (2018), secara global perempuan harus menambah 44 hari kerja agar mendapatkan pendapatan tahunan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan *Institute for Women's Policy Research* menemukan fakta bahwa perempuan mendapat gaji 20 persen lebih rendah dibanding laki-laki. Kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan dapat dikaitkan dengan sektor kerja perempuan. Berdasarkan Gambar 3.7 pekerjaan formal lebih banyak diisi oleh laki-laki. Pekerja perempuan lebih cenderung bekerja di sektor informal dibanding sektor formal. Menurut UN Women, banyak risiko yang

terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial sejenis undang-undang, tidak mendapat dana pensiun, dan tidak mendapatkan cuti serta asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual.

5.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Kelamin

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Pada kasus PMKS di Kabupaten Sragen tahun 2019 tercatat terdapat 16.723 jiwa penduduk PMKS. Apabila jumlah dipilah berdasarkan jenis kelamin 42% atau 7.015 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 58% atau 9.708 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari adanya kasus PMKS di wilayah Kabupaten Sragen, pemerintah memberikan pelayanan sosial berupa bantuan sosial dan penanganan melalui panti sosial milik pemerintah. Namun, sayangnya pelayanan sosial tersebut masih bias gender karena masih hanya salah satu jenis kelamin yang berhasil tercakup dalam layanan tersebut. Untuk bantuan sosial yang tercatat mendapatkannya di tahun 2019 100% dari jenis kelamin perempuan sebanyak 8.590 orang atau 51% dari seluruh PMKS yang tercatat Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2019. Untuk pelayanan melalui panti sosial milik pemerintah yang mendapatkannya 100% berjenis kelamin, sebanyak 9 orang dari 16.723 orang PKMS di Kabupaten Sragen tahun 2019, apabila diprosentasikan angka tersebut masih sangat kecil yakni 0.05%. Menurut Kementerian Sosial RI, terdapat jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

5.1.1. Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan masalah publik yang dapat menimpa penduduk laki-laki dan perempuan. Namun persoalan kemiskinan pada jenis kelamin perempuan akan menjadi lebih kompleks sebab adanya ketimpangan gender yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pada salah satu kasus kemiskinan adalah munculnya fakir miskin. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kehidupan fakir miskin.

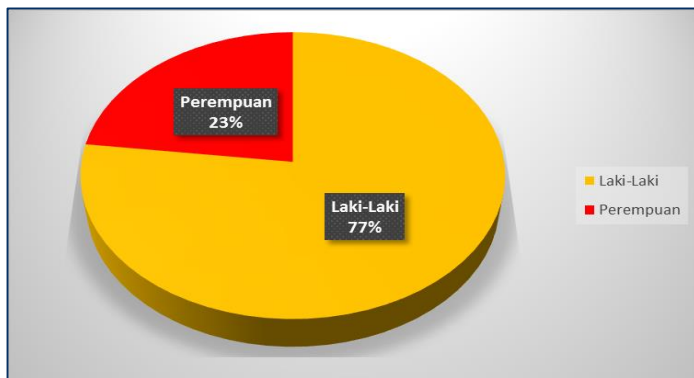
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria batasan penentuan fakir miskin antara lain; penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota; ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial); keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun); tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit; tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya; tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin; tinggal di rumah yang tidak layak huni; dan/atau kesulitan dalam memperoleh air yang bersih.

Pada kasus Kabupaten Sragen tahun 2019, jumlah fakir miskin menurut jenis kelamin lebih banyak dialami oleh laki-laki yakni sebesar 77% atau 52.697 orang dari total 68.331 fakir miskin yang tercatat. Pada jenis kelamin perempuan terdapat 23% (15.634 orang). Angka tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sragen, untuk memberikan pelayanan dan jaminan sosial bagi penduduknya dengan langkah penanggulangan kemiskinan yang pro gender pada kedua jenis kelamin.

Gambar 5.1.

Persentase Fakir Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

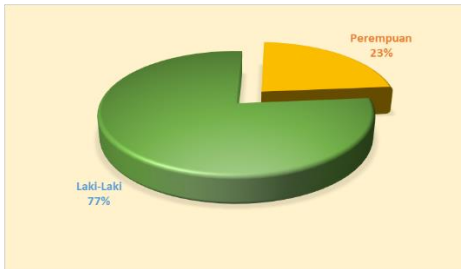
5.1.2. Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau paskarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Penduduk yang dikategorikan sebagai pemulung memiliki kriteria; tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan mengumpulkan barang bekas. Di

Kabupaten Sragen tahun 2019 jumlah pemulung yang tercatat yakni 24 orang dengan rincian 17 orang (71%) berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang (29%) perempuan. Meski demikian perhatian kepada kedua jenis kelamin dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada kategori pemulung harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen secara pro gender dan dengan pengarusutamaan gender.

Gambar 5.2.

Persentase Pemulung Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019



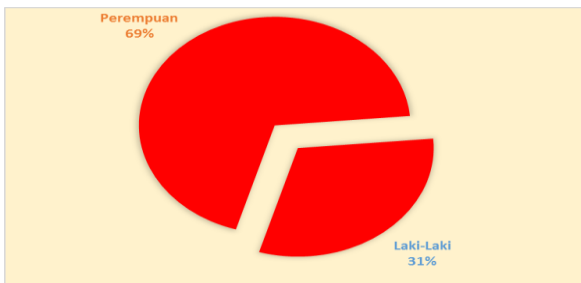
Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

5.1.3. Lansia Terlantar

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Akan tetapi tingkat kesejahteraan setiap lansia tidak sama. Pada masalah kesejahteraan lansia terdapat kasus lansia terlantar. nsia perempuan yang terlantar masih lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki terlantar.

Gambar 5.3.

Persentase Lansia Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

Di Kabupaten Sragen tahun 2019 jumlah lansia sebanyak 1.804 jiwa dengan rincian 567 jiwa (31%) lansia laki-laki dan 1.237 jiwa (69%) lansia perempuan. Upaya peningkatan

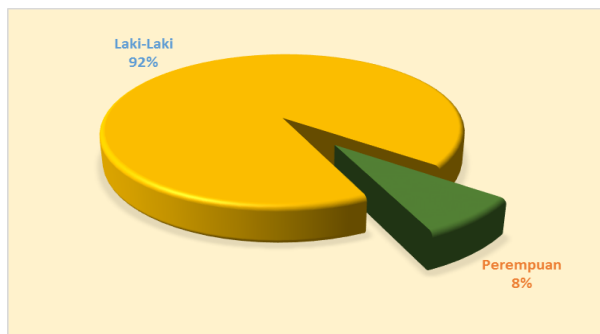
kesejahteraan sosial lanjut usia untuk tetap dapat berdaya dan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia maka perhatian pada lansia terlantar terpilah gender perlu ditingkatkan.

5.1.4. Warga Bekas Binaan Lembaga Perasyarakatan (LP)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Di Kabupaten Sragen tahun 2019 tercatat terdapat 37 warga bekas binaan Lembaga Perasyarakatan. Sebanyak 34 orang atau 92% adalah laki-laki dan 8% sisanya adalah perempuan.

Gambar 5.4.

Persentase Warga Bekas Binaan Lembaga pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

5.1.5. Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriteria dari tuna susila adalah menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remangremang, hotel, mall dan diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa. Di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 tercatat penyandang tuna susila pada jenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang. Dalam pemberian

pemberdayaan ketrampilan dan bantuan UEP/KUBE seluruhnya telah tercakup. Meski demikian, survei pelacakan perlu ditingkatkan untuk mendata fenomena di bawah permukaan gunung es dalam kasus penyandang tuna susila baik dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

5.1.6.Eks Korban NAPZA

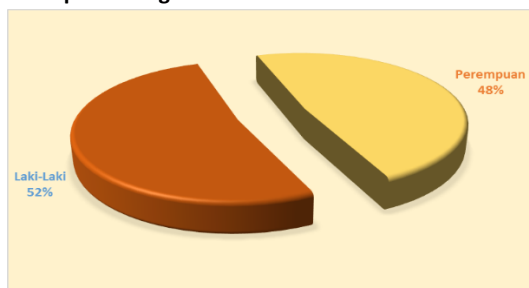
Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Data tahun 2019 di Kabupaten Sragen tercatat 3 orang eks korban NAPZA berjenis kelamin laki-laki dan seluruhnya telah mendapatkan bantuan pemberdayaan ketrampilan dan bantuan UPE/KUBE. Salam seperti halnya dalam hal kasus penyandang tuna susila, pelacakan dan pencatatan dapat lebih ditingkatkan untuk dapat memotret data eks korban NAPZA secara lebih komprehensif dari kedua jenis kelamin.

5.1.7 .Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Di Kabupaten Sragen tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas tercatat 3.192 jiwa dengan rincian 1.822 jiwa (57%) adalah laki-laki dan 1.370 jiwa (43%) penyandang disabilitas perempuan.

Gambar 5.5.

Persentase Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen Tahun 2019



Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

Menurut rinciannya pada setiap jenis disabilitas adalah sebagai berikut: pertama, pada penyandang disabilitas fisik tubuh (tuna daksa) terdapat 1.460 jiwa dengan rincian 60% laki-laki dan 40% perempuan; kedua pada penyandang disabilitas fisik mata (tuna netra) tercatat sebanyak 266 jiwa dengan rincian 52% laki-laki dan 48% perempuan; ketiga pada

kelompok disabilitas fisik rungu/wicara tercatat ada 257 jiwa dengan rincian 56% laki-laki dan 44% perempuan; keempat pada kelompok penyandang disabilitas mental retardasi (tuna grahita) ada 580 jiwa dengan rincian 54% laki-laki dan 46% perempuan; kelima pada penyandang disabilitas mental eks psikotik (tuna laras) tercatat ada 376 jiwa dengan rincian 52% laki-laki dan 48% perempuan; dan keenam pada kelompok penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda) tercatat ada 253 jiwa dengan data terpilah 62% laki-laki dan 38% perempuan. Seluruh penyandang disabilitas baik berdasarkan kelompok disabilitas dan jenis kelamin berhak mendapatkannya pelayanan publik yang adil dan berkualitas serta responsif gender.

Tabel 5.1

Persentase Peyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitas di kabupaten Sragen tahun 2019

Karakteristik (1)	Prosesntase (2)
Tuna Daksa	
Laki-laki	60
Perempuan	40
Tuna Netra	
Laki-laki	52
Perempuan	48
Tuna Rungu/Wicara	
Laki-laki	56
Perempuan	44
Tuna Grahita	
Laki-laki	54
Perempuan	46
Tuna Laras	
Laki-laki	52
Perempuan	48
Ganda	
Laki-laki	62
Perempuan	38

Sumber: Profil Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah , 2019

5.2. Status Kepemilikan Rumah dan Perumahan Kumuh

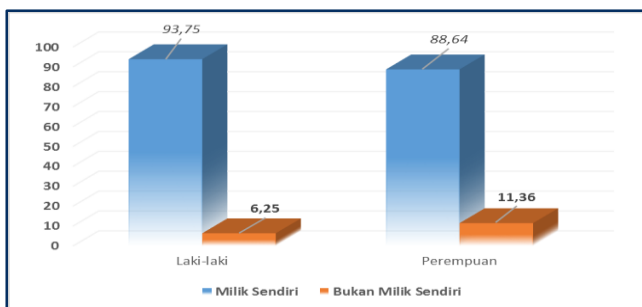
Menurut *World Health Organization* (WHO), tempat tinggal yang berkualitas sangat bermanfaat bagi penghuninya, dimana mereka akan merasa aman, terlindungi, dan terjamin kesehatannya. Kualitas tempat tinggal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu (1) kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni, 2) konstruksi, bahan, dan kualitas interior, (3) infrastruktur lingkungan, serta (4) tatatan sosial lingkungan sekitar. Dengan demikian, kualitas tempat tinggal perlu diperhatikan guna menjaga kesehatan

penghuninya, terutama anak-anak. Anak membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Status kepemilikan rumah tinggal dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk.

Tempat tinggal yang tetap dan terjamin menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sragen sama yang terjadi di Indonesia secara umum yaitu tinggal di rumah milik sendiri. Pada 2019, Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal milik sendiri sudah tinggi, di atas 90%. Kepala Rumah tangga Laki-Laki lebih banyak yang status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dibandingkan Kepala Rumah tangga Perempuan.

Gambar 5.6

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Sragen tahun 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen Tahun 2019

Di Kabupaten Sragen juga masih ada penduduk yang tinggal di perumahan kumuh. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di kabupaten/Kota lainnya namun di Kabupaten Sragen masih terdapat perumahan kumuh. Permukiman kumuh berkembang pada area bantaran sungai, kawasan industri atau pabrik tahu dan kawasan permukiman yang memiliki kepadatan dan mayoritas bangunan berdiri dengan bahan kayu dan alas lantai tanah. Identifikasi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Sragen terdapat 3 kelurahan yang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman yang bersifat kumuh, yakni Kelurahan Sragen Wetan, Sragen Tengah dan Kelurahan Plumbungan. Kelurahan Sragen Wetan memiliki 3 dusun yang teridentifikasi, yaitu Sragen Widoro, Sragen Manggis (kawasan permukiman padat dan rumah yang tidak layak huni) dan Teguhan (kawasan industri tahu dan bantaran sungai). Sedangkan kelurahan Sragen tengah terdiri dari 2 dusun, yaitu Tlebengan dan Gerdu (kawasan permukiman padat huni). Serta kelurahan Plumbungan, tepatnya di Dusun Bangunrejo (permukiman tidak layak huni dan berada dibantaran sungai). Berdasarkan tingkat kekumuhan, Kawasan Tlebengan adalah permukiman kumuh

berat, sedangkan kawasan Gerdu dan Sragen Manis terkategori pemukiman kumuh sedang, sisanya termasuk pemukiman kumuh ringan (lihat tabel 5.1)

Tabel 5.2

Sebaran, Luas dan Tingkat Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sragen Tahun 2019

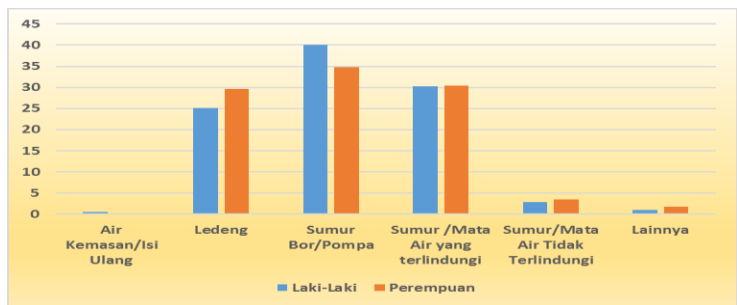
Kecamatan	Desa	Kawasan	Tipologi	Luas
Karangmalang	Plumbungan	Bangunrejo	Kumuh Ringan	1.27
Sragen	Sragen wetan	Sragen Widoro	Kumuh Ringan	1.07
Sragen	Sragen wetan	Teguhan	Kumuh Ringan	0.73
Sragen	Sragen tengah	Gerdu	Kumuh Sedang	0.24
Sragen	Sragen wetan	Sragen Manggis	Kumuh Sedang	0.15
Sragen	Sragen tengah	Tlebengan	Kumuh Berat	0.14

[Http://si.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan_permukiman/kawasan_kumuh](http://si.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan_permukiman/kawasan_kumuh)

1.2.2. Akses Terhadap Air Layak

Gambar 5.7

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Sragen tahun 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen Tahun 2019

Berdasarkan sumber air utama yang digunakan oleh Rumah Tangga di Tabupaten Sragen tahun 2019, sumur Bor dan Pompa adalah sumber air utama yang digunakan paling banyak oleh Masyarakat Sragen. Di Kabupaten Sragen, penyediaan bersih dilakukan melalui Perusda Air Minum Tirto Negoro. Pemerintah kabupaten Sragen sesuai dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang harus bisa memenuhi kebutuhan pokok air bersih terlindung dari pencemaran, selalu memperluas jangkauan Pelanggan PDAM. Pada tahun

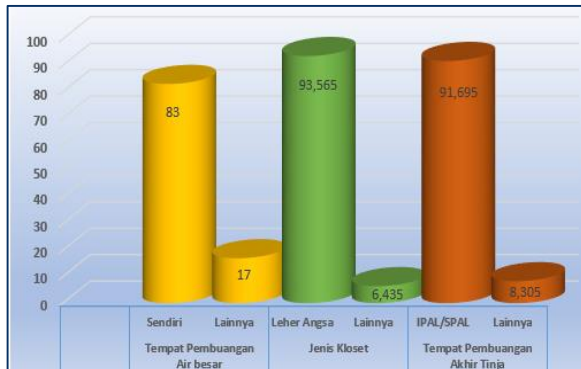
2019 jumlah Rumah Tangga Terlayani PDAM di Kabupaten Sragen hampir 25 % dari jumlah penduduk. Pada tahun 2018 Jumlah pelanggan Total berjumlah 64.824 pelanggan. Jumlah Pelanggan Aktif 60.785. Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi yaitu 34,49 %, sedangkan Cakupan Pelayanan Wilayah Pelayanan 52,91 %. Diperkotaan cakupan pelayanan sudah 63,75 % sedangkan di pedesaan pelayannya 43,24%. Berdasarkan Kecamatan, pelanggan terbanyak dari PDAM adalah Kecamatan Karangmalang yaitu 12.988 pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 4.118.335. Masih ada tiga kecamatan yang belum satupun penduduknya yang menjadi pelanggan PDAM, yaitu Kecamatan Tangen, Jenar dan Miri.

5.3. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman. Sanitasi layak yang dicerminkan dari kepemilikan jamban sendiri dengan tangki septik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu. Hampir 82% rumah tangga di Kabupaten Sragen sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, baik itu yang kepala rumah tangganya perempuan maupun laki-laki. Namun demikian masih ada 18 persen keluarga yang masih menggunakan fasilitas lainnya. Terkait dengan jenis kloset yang digunakan untuk buang air besar, hampir 93% keluarga menggunakan kloset jenis leher angsa, jenis lainnya terdata 7%. Terkait pembuangan akhir tinja 91,65 % keluarga sudah menggunakan IPAL/SPAL.

Gambar 5.8

Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Jenis Kloset dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Sragen tahun 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen Tahun 2019

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi sanitasi yang buruk merupakan tempat berkembangnya penyakit menular yang dapat menyebabkan morbiditas masyarakat, terutama usia di bawah lima tahun yang masih rentan terhadap penyakit. Balita yang tidak sehat dan terpapar penyakit akan cenderung meningkatkan risiko stunting dibandingkan balita yang tumbuh sehat.

6.1. Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender Berjalan Searah

Selain meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara umum, kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi fokus pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap berbagai hal seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Pembangunan manusia dan pembangunan gender menjadi target pembangunan baik di tingkat nasional maupun global. IPM dan IPG menjadi indikator dalam melihat capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender. Suatu daerah diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan kualitas hidup manusia namun juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, idealnya daerah dengan IPM yang tinggi akan mendorong pada pembangunan gender yang lebih baik.

Sebaran IPM dan IPG tahun 2018 menunjukkan pola yang searah, IPM tinggi akan memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Dengan hubungan yang positif berarti daerah dengan IPM tinggi akan cenderung memiliki IPG yang tinggi juga, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini ditunjukkan oleh Kabupaten Sragen yang selain mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, juga berhasil mewujudkan kondisi yang seimbang antara pembangunan laki-laki dan perempuan.

Untuk melihat lebih dalam dan menghindari potensi salah tafsir terhadap IPG, kita perlu memperhatikan indikator penyusunnya, yaitu IPM. Karena IPG dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki, maka IPG yang rendah dapat terjadi karena IPM perempuan jauh di bawah IPM laki-laki, sedangkan IPG yang tinggi dapat terjadi karena IPM laki-laki dan perempuan yang hampir setara, bisa sama-sama tinggi, sama-sama sedang, atau bahkan sama-sama rendah.

Capaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari capaian seluruh wilayah yang lebih kecil di bawahnya. Percepatan pembangunan yang terjadi pada tingkat nasional juga dipengaruhi pertumbuhan di level provinsi dan kabupaten/kota.

6.2. Peningkatan Kualitas Perempuan Seharusnya Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan gender erat kaitannya dengan pembangunan gender. Pemberdayaan gender terjadi ketika perbaikan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi berhasil mendorong terwujudnya pemberdayaan (Cinar, 2018). Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, perempuan cenderung tertinggal di berbagai peran seperti ekonomi tenaga kerja dan pengambilan keputusan yang disebabkan

oleh mengakarnya budaya patriarki. Seiring dengan meningkatnya kualitas perempuan antarwaktu, yang ditandai dengan peningkatan IPG, pemberdayaan yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat terwujud.

Keterkaitan antara IPG dan IDG menunjukkan hubungan yang positif, Artinya, wilayah dengan tingkat pembangunan gender yang tinggi. akan memiliki tingkat pemberdayaan gender yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Gambaran hubungan antara IPG dan IDG yang unik ditunjukkan oleh Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen telah mampu mencapai kesetaraan dalam hal kualitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan, tetapi belum maksimal pada pemberdayaan gender. Kabupaten Sragen masuk dalam Kuadran II yang berisi provinsi-provinsi dengan IPG di atas angka nasional, tetapi capaian IDG di bawah angka nasional. Hal ini terjadi karena Pergeseran posisi posisi antarkuadran berdasarkan capaian pembangunan dan pemberdayaan gender tergantung dari banyak hal. Perbedaan kecepatan pembangunan perempuan dan laki-laki, perbedaan perubahan komposisi setiap komponen antar kabupaten kota, juga perbedaan terhadap capaian provinsi dan nasional berpengaruh terhadap pergeseran ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, Sabina. 2010. *Human Development: Definitions, Critiques, And Related Concepts*. OPHI Working Paper No. 36
- Arjani, N. L. 2003. *Ketimpangan Gender Dibeberapa Bidang Pembangunan Di Bali*. Jurnal Studi Gender SRIKANDI.3:1.
- BPS. 2018. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2018*. Jakarta : BPS.
- Corley, Marva, Yves Perardel And Kalina Popova. 2005. *Wage Inequality By Gender And Occupation: A Cross-Country Analysis*. Employment Strategy Papers.
- Cinar, Kursat. 2018. *The Determinants Of Women's Empowerment In Turkey: A Multilevel Analysis*. Journal South European Society And Politics Volume 23, 2018-Issue 3
- Council On Foreign Relations (CFR). *Ending Child Marriage: How Elevating The Status Of Girls Advances U.S. Foreign Policy Objectives* , P.6.
- Effendy. 1998. *Pengertian Keluarga*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- European Commission. 2005. *Employment In Europe 2005: Recent Trends And Prospects*. Brussels : European Commission.
- <https://www.unfpa.org/Gender-Equality>
- Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2020, Badan Pusat Statistik,
- Kachere, Wadzanai. 2017. *Incomes Disparity Along Gender Lines: The Plight Of Women In The Informal Sector*. Journal Of Sociology And Social Anthropology, 8(4), 193–198.
- KPPPA. 2018. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*. Jakarta: KPPPA.
- Keputusan Bupati Sragen No. 800/326/003/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Dan Bayi Kabupaten Sragen Perode Tahun 2018-2021.
- Keputusan Bupati Sragen No. 800/330/003/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sragen Tahun 2019
- Lan, Thung Ju. 2015. *Perempuan Dan Modernisasi*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 1 Tahun 2015
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. *Economic Development*. Erlangga, 2006
- Nelien Haspels Dan Busakorn Suriyasarn.(2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender. Professionals In The Workplace: Women In The Professional Workforce*. <https://dpeafclio.org/Programs-Publications/Professionals-In-The-Workplace/Women-In-The-Professional-And-Technical-Labor-Force/>
- Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tanggal 19 Juni 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Kab Sragen.
- Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Kab Sragen
- Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010 Tentang Pendidikan Kab Sragen
- Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Kab Sragen.
- UN Women. 2015. *Progress Of The World's Women 2015-2016*. United States: UN Women.
- Shaman, K. A. (2010). *Gender Asymmetry In Family Migration: Occupational Inequality Or Interspousal Comparative Advantage?* Journal Of Marriage And Family, 72(2), 375–392. Doi:10.1111/J.1741-3737.2010.00706.X

Sistem Informasi Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sragen Dalam Angka Tahun 2020, BPS

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sragen Tahun 2019

United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*.

UNDP: Human Development Report Office. Jean Lemai. 2002. *Why Do Females Live Longer Than Males?*.UN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Ang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

